

Penarapan Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada PKS DPRD SU

Shintya Monica Hasibuan¹, Via Avinka Valentina², Riska Adelina Nasution³, Zulhazmi Maulana⁴, Elly Warnisyah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

shintyamhsb@gmail.com¹

ABSTRACT

Political recruitment is regulated in article 11 paragraph 1 of Law No. 2 of 2008 concerning political parties which states that one of the functions of political parties is as a means of political recruitment in the process of filling political positions through a mechanism that takes into account gender equality and justice. The aim of this research is to find out how the Prosperous Justice Party (PKS) performs its function as a place for political recruitment in delivering for every member of the public who wants to occupy government positions or as party administrators by going through the stages of selection from the aspect of political recruitment. The process of writing this is by applying qualitative methods with secondary data sourced from previous research journals. Members are the most important factor in political parties, they function to market political parties to the public. In addition, cadres conduct party education to the community, and empower the community to understand the importance of politics in the life of the state. Currently, many people do not understand the role and importance of political parties in government. Meanwhile, the position and function of political parties in government is very important so that qualified and integrity cadres are needed to lead Indonesia.

Keywords : political parties, prosperous justice party, political recruitment

ABSTRAK

Rekrutmen politik di atur pada pasal 11 ayat 1 UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutment politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambar bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaksanakan fungsi sebagai tempat rekrutmen politik dalam mengantarkan bagi setiap masyarakat yang ingin menduduki kursi jabatan Pemerintahan maupun sebagai pengurus partai dengan melalui tahapan seleksi dari aspek rekrutmen politik. Proses penulisan ini adalah dengan penerapan metode kualitatif dengan data skunder yang bersumber dari jurnal penelitian terdahulu. Anggota adalah faktor paling utama dalam partai politik, mereka berfungsi memasarkan partai politik kepada masyarakat. Selain itu, kader melakukan pendidikan partai kepada masyarakat, serta memberdayakan masyarakat agar paham pentingnya politik dalam kehidupan bernegara. Saat ini, banyak rakyat yang tidak paham akan peran dan pentingnya partai politik dalam pemerintahan. Sedangkan, kedudukan dan fungsi partai politik di pemerintahan sangat penting sehingga diperlukan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas dalam memimpin Indonesia.

Kata kunci: partai politik, partai keadilan sejahtera, rekrutment politik.

PENDAHULUAN

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. PKS sering disebut sebagai keajaiban politik di Indonesia. Betapa tidak, hanya sekitar satu tahun setelah dideklarasikan (Agustus 1998), partai yang semula bernama partai keadilan itu telah berhasil mengikuti pemilu 1999. Dalam pemilu 2004-2009, PKS mampu meningkatkan jumlah suara yang sangat signifikan. Partai yang karena alasan *electoral threshold* berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. [M. Imdadun Rahmad, 2008: 1]

Partai politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Partai politik agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, partai politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kursi di parlemen. Fungsi partai politik terlihat sangat mengendor malah pasca kemerdekaan telah direbut dimana yang muncul bukan kepentingan rakyat, melainkan sebaliknya, kepentingan yang mengutamakan rakyat tersebut di atur oleh kepentingan golongan yang ingin merebut kekuasaan. [Ilham Yuli Isdiyanto, 2017: 164]

Partai politik dalam melakukan rekrutmen secara ideal berpedoman pada sejumlah prinsip yang berlaku secara umum atau lazim dalam proses kandidasi Minimal ada 10 prinsip yang perlu menjadi rujukan. [Syamsuddin Haris, 2016: 61]

1. Loyalitas yaitu kesetiaan pada partai merupakan landasan penting bagi seorang politisi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ideologi partai.
2. Bersih, anggota, kader, dan pengurus partai politik merupakan politisi yang akan mewakili masyarakat, baik dilembaga legislatif maupun eksekutif.
3. Transparan/terbuka. Transparan atau keterbukaan merupakan prinsip yang perlu dianut dalam setiap proses rekrutmen terutama untuk pengurus dan pejabat publik.
4. Akuntabilitas. Proses rekrutmen hendaknya dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada anggota partai namun juga kepada masyarakat.
5. Meritokrasi. Dalam hal rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik, partai politik seharusnya menyampingkan mekanisme rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan.
6. Demokratis (*fairness dan inklusi*). Demokratisasi dalam proses rekrutmen diekspresikan sebagai perluasan partisipasi di dalam proses dimana ketika penyeleksi mengikuti perubahan metode seleksi kandidat lebih inklusif dibandingkan sebelumnya.
7. *Decentralized/autonomus*. Dalam hal otoritas penentuan kandidat, seleksi caleg oleh pengurus partai di tingkat pusat dan tingkat daerah seharusnya dilakukan secara proposional.
8. Kecukupan pembiayaan. Dalam menjaring anggota baru, partai politik hendaknya memperhatikan kemampuan calon anggota dalam hal memberikan dukungan finansial.

9. Humanis. Prinsip dalam rekrutmen ini menekankan pada keterbukaan akses bagi siapa saja tanpa memperhatikan status sosial-ekonomi.
10. Non-partisan. Prinsip ini terutama berlaku bagi pihak yang menyeleksi. Dalam melakukan seleksi pengurus, caleg dan calon pejabat eksekutif, tim penyeleksi harus memperlakukan calon dengan hak yang sama.

Rekrutmen dan kaderisasi Anggota Biasa dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme sebagai berikut [Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, pasal 10] :

- a) Setiap orang yang secara sukarela mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Pendukung.
- b) Setiap Anggota Pendukung yang setia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Terbina.
- c) Setiap Anggota Terbina yang setia mengikuti pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Inti.

METODE PENELITIAN

Proses penelitian dilakukan dengan menerapkan proses pendekatan dan datang di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, baik secara individu atau berkelompok mengenai pentingnya pengawasan verifikasi administrasi partai politik. Dengan penerapan studi kasus yang kami lakukan, maka peneliti dapat menerima kebutuhan data dan dengan melakukan wawancara, observasi, baik itu melalui dokumen maupun survei secara langsung. Peneliti melakukan wawancara yang terstruktur dengan pihak terkait disertai dengan observasi guna melakukan pengamatan terhadap situasi serta keadaan di lapangan untuk mendapatkan data yang nyata (aslinya) dengan situasi yang sebenarnya. Data yang berhasil didapatkan selanjutnya akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif guna penerapan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Keadilan Sejahtera DPRD-SU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

- a. Profil Singkat DPW F-PKS Sumatera Utara

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Utara sudah ada sejak partai politik ini bernama PKS. Awal kepengurusan DPW Sumatera Utara diketuai oleh H. JUMADI, S.Pd.I, MIKOM, dan beberapa tokoh yang ikut memperjuangkan perkembangan PKS di Provinsi Sumatera Utara antara lain Hendro Susanto, Ahmad Hadian, S.Pd.I, Dra. Hj. Hidayah Herlina Gusti.

- b. Visi Fraksi PKS

Menjadi Partai Islam rahmatan lil'alamina yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Misi Fraksi PKS

1. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Anggota Partai dan mengokohkan integrasi, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan

kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

2. Mengokohkan solidaritas Partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.
3. Meningkatkan kepoloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sector pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotic.
4. Memenangkan Pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi Partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan public yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi dikawasan, dan pengembangan kerjasama Internasional unruk memperkokoh posisi Inonesia.

Pelaksanaan Rekrutmen Politik oleh DPW PKS Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian, pola rekrutmen politik yang digunakan oleh DPW PKS Sumut dalam merekrut calon anggota baru yaitu dengan pola rekrutmen yang bersifat terbuka. DPW PKS Sumut menggunakan pola rekrutmen yang bersifat terbuka yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ideology, visi dan misi partai. Seperti contoh adanya kegiatan pembuatan video kreatif, lomba baca kitab kuning, dll sebagainya. Kegiatan video kreatif ini merupakan salah satu bentuk menggali potensi dari setiap kalangan terutama anak-anak muda serta dalam menjalankan fungsi partai, yaitu sebagai rekrutmen politik, disamping ajang video kreatif akan diselipkan formulir ke anggotaan.

Selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, seluruh anggota yang berada di struktural maupun non struktural juga diwajibkan untuk memasarkan partai PKS ini secara door to door, yang dimana dengan cara tersebut lebih memudahkan para anggota untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat sampai ketinggian terendah yaitu tingkat RT. Anggota yang tergabung dengan partai PKS diwajibkan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RT setempat sesuai dengan tempat tinggal masing-masing agar bisa lebih mengenalkan partai PKS ini secara baik dan jelas. DPW PKS Sumatera Utara juga menekankan setiap anggota untuk berperilaku yang baik sehingga dari perilaku para anggota tersebut akan mencerminkan citra partai PKS dengan baik di kalangan masyarakat.

Adapun manfaat dari pola rekrutmen yang terbuka ini diharapkan partai PKS mampu memberikan kesan yang transparan, demokratis serta keterbukaan tentang adanya pelaksanaan rekrutmen calon anggota baru di kalangan masyarakat.

Partai PKS memiliki tujuan untuk terus bisa mengedepankan manfaat dari adanya pola rekrutmen yang bersifat terbuka ini.

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan oleh DPW PKS Sumatera Utara dalam rekrutmen anakmuda untuk menjadi kader ialah dengan mengkombinasikan antara nilai-nilai ke-Islaman dan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan anak-anak muda lebih tertarik dengan bisnis dibandingkan dengan politik. Yaitu dengan cara, mengadakan lomba video kreatif, lomba membaca kitab kuning, menyalurkan bantuan serta menjadi relawan untuk masyarakat yang terkena musibah.

Biasanya anggota muda (anak muda) melalui proses kaderisasi yang bernama "Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota". Ada tiga hal yang ditanamkan kepada para anggota kader ialah :

1. Nasirul Fikri, yaitu menanamkan semangat dakwah, mengenalkan tuhanNya atau Islam serta nilai-nilai kepartaian
2. Tanmiyatul Kafahah, yaitu menanamkan skill atau keterampilan agar kader mampu mengarungi kehidupan dan dapat hidup secara mandiri
3. Kasbul Maisah, yaitu mengajarkan mereka untuk bisa berprestasi sehingga dapat berbakti kepada partai

DAFTAR PUSTAKA

Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS: Dari Mesjid Kampus Ke Gudang Parlemen*, Yogyakarta: Lkis 2008.

Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Syamsuddin Haris, dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, Jakarta: P2Politik LIPI, 2016.

Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera pasal

10, <https://pks.id/resources/documents/AD-ART%20PKS.pdf>